

ABSTRAK

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Kawasan Bromo, Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan juga didaamnya termasuk kawasan pendukung Madura dan kepulauan, maka kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalam pengaturan penganggaran pengembangan daerah minapolitan Madura karena berdasar PerPres ini ditetapkan memiliki estimasi anggaran sejumlah 728 Milyar. Maka dari ini itu bagaimana kewenangan daerah dalam menyusun kebijakan serta bagaimana politik hukum penganggaran program pengembangan wilayah minapolitan Madura dan kepulauan.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif atau penelitian doctrinal. Adapun untuk pendeketannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dengan analisis bahan hukum secara deskriptif atau setelah penulis memperoleh bahan-bahan hukum, kemudian dianalisa dan dikaji untuk selanjutnya di rangkum sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun ataupun membuat kebijakan didalam penganggaran program pengembangan kawasan minapolitan Madura dan kepulauan memiliki kewenangan dan berhak membuat kebijakan. Daerah yang berwenang adalah daerah tingkat satu yaitu Pemerintahan Provinsi. Sedangkan untuk daerah lingkung Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan dalam memberikan kebijakan terhadap daerah pesisir dalam hal ini kawasan minapolitan, namun didalam hal penyusunan kebijakan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bisa memberikan kontribusinya dengan ikut andil dalam Koordinasi penyusunan Rencaana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil pada kawasan yang Kabupaten/Kota miliki. Selanjutnya untuk politik hukum penganggaran diatur dalam beberapa kebijakan peraturan yang menyinggung terkait pedoman didalam penyusunan perencanaan program pengembangan kawasan Minapolitan.

Kata kunci: kewenangan-kebijakan-politik hukum-minapolitan

ABSTRACT

With the enactment of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 80 of 2019 concerning Acceleration of Economic Development in Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. The Bromo, Tengger-Semeru areas, as well as the Selingkar Wilis and Southern Cross areas are also included in the supporting areas of Madura and the islands, so government policies are urgently needed, especially in setting the budget for the development of the Madura minapolitan area because based on this Presidential Regulation, it is set to have an estimated budget of 728 billion. So from this, how is the regional authority in formulating policies and how is the legal politics of budgeting the development program for the minapolitan region of Madura and the islands.

The research method used is normative research or doctrinal research. As for the approach, it uses a statutory approach and a conceptual approach with a descriptive analysis of legal materials or after the author has obtained legal materials, then they are analyzed and studied for further summarization so as to produce a conclusion.

The results of this study indicate that the local government in formulating or making policies in budgeting the development program for the minapolitan area of Madura and the islands has the authority and has the right to make policies. The authorized area is the first level area, namely the Provincial Government. Meanwhile, the Regency/City environmental area does not have the authority to provide policies for coastal areas, in this case the minapolitan area, but in terms of policy formulation, the Regency/City Regional Government can contribute by taking part in the Coordination of the preparation of the Zoning Plan for Coastal Zone and Small Islands in area owned by the Regency/City. Furthermore, the legal politics of budgeting is regulated in several regulatory policies that pertain to guidelines in the preparation of planning for the development of the Minapolitan area.

Keywords: authority- policy -politics of law-minapolitan